

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-aitaam*



Diajukan Oleh :

Refa Nurlatifah

NIM : 2274201008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yang dipersiapkan dan di susun oleh

Refs Nurlatifah

NIM: 2274201008

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dan di nyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman,S.H.,M.H

Penguji 1 Dr, Henky Solihin MZ,S.H.,M.H

Penguji 2 Budiana,S.H.,M.H

Bandung,..... 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana,S.H.,M.H.

NIDN.0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sili Al-Aitaa adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 20 Juni 2026

Penulis



Refa Nurlatifah

NIM: 2274201008

Pembimbing I

DR. Rima Komariah, S.H., M.Kn

NIP: 209240471

Pembimbing II

Intan Yutikasari, S.H., M.Kn

NIP: 234250994

ABSTRAK

Praktik perkawinan masyarakat adat Baduy menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelenggaraan perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya masyarakat adat Baduy melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat dan kepercayaan lokal yang kemudian berimplikasi terhadap aspek pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status hukum perkawinan, hak-hak keperdataan, serta perlindungan hukum bagi para pihak dan anak yang dilahirkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perkawinan masyarakat adat Baduy, khususnya mengenai harmonisasi antara hukum adat, hukum perkawinan, dan sistem administrasi kependudukan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan masyarakat adat Baduy Luar telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan melalui mekanisme dualisme ijab kabul, yaitu pencatatan di hadapan penghulu dan pengesahan adat oleh Kokolot Baduy. Harmonisasi tersebut mewujudkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan hukum adat. Perlindungan hukum bagi anak juga telah terpenuhi karena mayoritas perkawinan dicatatkan. Terhadap perkawinan yang belum tercatat, negara menyediakan mekanisme *itsbat nikah*, penetapan asal usul anak, dan penerbitan akta kelahiran guna menjamin status hukum serta hak-hak anak.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Hukum Adat Baduy, Pluralisme Hukum, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The marriage practices of the Outer Baduy indigenous community reflect the dynamic relationship between state law and customary law in the administration of marriage. Under the Indonesian legal system, marriage is governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires every marriage to be officially registered to ensure legal certainty and legal protection. On the other hand, Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes and respects indigenous customary law communities and their traditional rights, provided that they remain in existence and are consistent with societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In practice, however, the Outer Baduy community conducts marriages based on customary law and local beliefs, giving rise to legal issues concerning marriage registration, civil administration, legal status of marriage, civil rights, and legal protection for both spouses and children born from such marriages.

This study employed a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The data consisted of primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and other relevant legislation, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and other scholarly literature. The data were analyzed qualitatively to examine the conformity between the applicable legal norms and the marriage practices of the Outer Baduy indigenous community, particularly regarding the harmonization of customary law, marriage law, and the national population administration system.

The findings indicate that the marriage practices of the Outer Baduy indigenous community are consistent with the Marriage Law through a dual marriage solemnization mechanism, namely the official registration before a marriage registrar (penghulu) and the customary solemnization before the Kokolot Baduy. This harmonization provides legal certainty without disregarding customary law. Legal protection for children has also generally been fulfilled because most marriages are officially registered. For unregistered marriages, the state provides legal mechanisms through marriage validation (itsbat nikah), judicial determination of a child's legal parentage, and the issuance of birth certificates to ensure the child's legal status and the protection of their rights.

Keywords: *Marriage Registration, Baduy Customary Law, Legal Pluralism, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik perkawinan masyarakat adat Baduy Luar yang masih mempertahankan nilai, norma, dan tradisi turun-temurun. Perkawinan adat tersebut memiliki karakteristik khusus, terutama dalam tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Di satu sisi, hal ini merupakan wujud hak masyarakat adat dalam menjaga identitas budaya. Namun di sisi lain, ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perkawinan adat Baduy Luar, kesesuaiannya dengan hukum perkawinan di Indonesia, serta akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, bapak Budiana S.H., M.H., yang telah memberikan arahan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini kepada penulis di Fakultas Hukum.
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, bapak Budi Rahman S.H., M.H., yang telah memberikan arahan serta memberikan pengetahuan baru selama proses perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn Yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II, Ibu Intan Yutikasari S.H., M.Kn Yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan adat Baduy Luar serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Bandung, ... 2026

Refa Nurlatifah
NIM.2274201065

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metodologi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Konsep Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	12
B. Syarat Sah Perkawinan.....	22
C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	24
D. Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Adat	27
E. Perlindungan Hukum Anak	31
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR	
A. Gambaran Umum Masyarakat Baduy	41
B. Sejarah Masyarakat Adat Baduy Luar	44
C. Sistem Dan Tatacara Perkawinan Adat Baduy Luar.....	56

D.	Proses Peminangan dan Penentuan Mahar Masyarakat Adat Baduy Luar ..	60
E.	Problematika Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy	65

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

A.	Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan.....	69
B.	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Baduy Luar	76

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	94
-----------------------	-----------